

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Cahyani, D. H., & Retno, R. (2018). Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data atau Keterangan (SP2DK) dalam Pengawasan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, VII(2), 1-11.
- Badan Pusat Statistik (2020). [https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-
pendapatan-negara.html](https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html)
- Irawan, R., & Sadjiarto, R. A. (2013). Pengaruh Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tarakan. *Tax & Accounting Review* 3(2), 2.
- Kowel, V. A., Sondakh, T. F., Pua, A. I., & Budiarmo, N. S. (2018). Ipteks Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Oleh Account Representative Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(02), 113-118.
- Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman, K. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan* 9(1), 12-18.
- Parmono, F. V. (2016). Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA* 4(1), 934-944.

- Utami, O. D. (2021). Analisis Efektivitas Kegiatan Pengawasan oleh *Account Representative* Melalui Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Palembang. [Karya Tulis Tugas Akhir belum dipublikasikan]. Politeknik Keuangan Negara STAN
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardana, A. B. (2018). Nudges pada SP2DK Sebagai Bagian dari Upaya Peningkatan Tax Compliance di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia* 2(1), 23-28.
- Widomoko, W., & Nofryanti, N. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi oleh Account Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kpp Menteng Satu Jakarta Pusat). *Jurnal Renaissance*, 132-146.
- Direktur Jenderal Pajak. (2015) *Surat Edaran Nomor 35/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Direktur Jenderal Pajak. (2020) *Surat Edaran Nomor 07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Direktur Jenderal Pajak. (2022) *Surat Edaran Nomor 05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Indonesia, P. (2009). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Indonesia, P. (2009). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan